

Pelatihan Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan Bagi OMS Sesi II

Derry Wanta, SE., Msi, CIBA
13 Desember 2021





KONTEN PELATIHAN

01

Pendahuluan
& Mapping
Peserta

02

Refresh Materi
Pertemuan
Pertama

03

Kupas Sekilas
Laporan
Keberlanjutan

04

Blended
Finance: Apa
dan
Bagaimana

05

Diskusi:
Lembaga ku
SDG's & SF

06

Penutup



1. Pendahuluan & Mapping Peserta

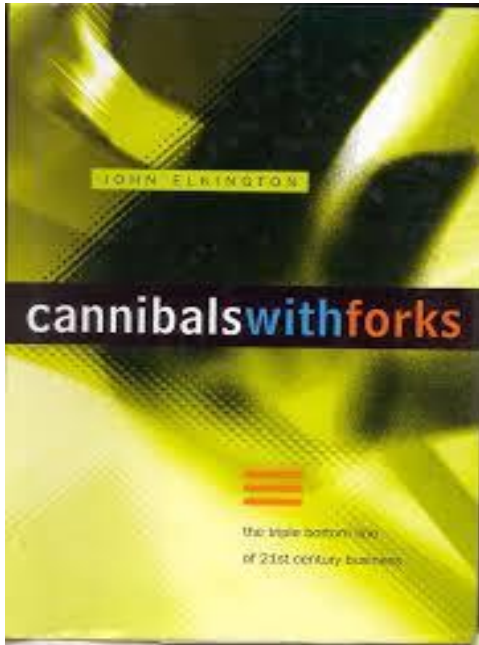


Refresh Materi Pertemuan Pertama



* The figures denote the corresponding subclause numbers in ISO 26000.

Sustainability Concept



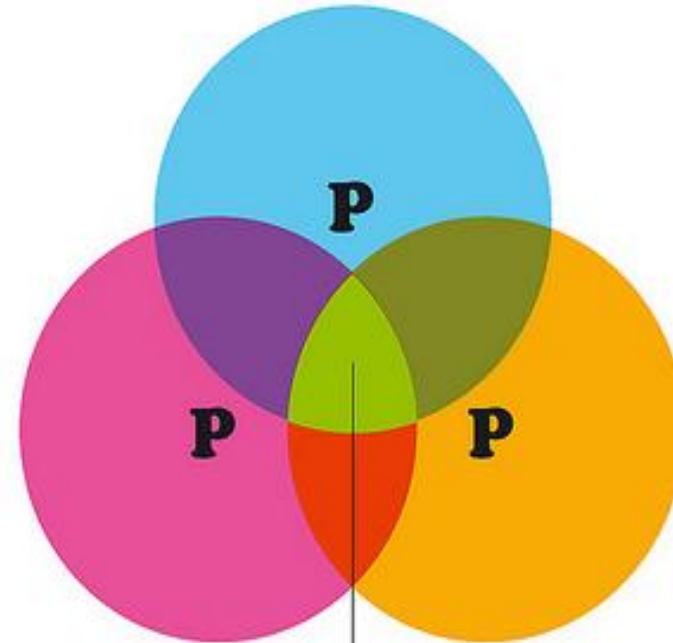
CANNIBALS WITH FORKS

The Triple Bottom Line of 21st Century Business

John Elkington

CAPSTONE

**People,
planet
and profit.**



Sustainability is the connector of any enterprise's bottom line initiatives.

Sustainability

Definisi Keuangan Berkelanjutan

Keuangan Berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia

2015-2019

Indeks
Hijau

Obligasi
Hijau

Produk
Ramah
Lingkungan

Transportasi
Hijau

Energi
Terbarukan

Konservasi
Energi

Pariwisata
Ramah
Lingkungan

Pertanian
Organik

ROADMAP I

Landasan Penerapan SF / Basis for Implementation of SF:

1. Kebijakan Prinsip SF / Policy on SF Principles
2. Kebijakan Peningkatan Porsi SF / Policy on Increase on SF portfolio
3. Kebijakan pengawasan SF / Policy on SF supervision

Insentif kerjasama dengan Instansi lain / Incentives in collaboration with relevant institutions:

1. Insentif Fiskal / Fiscal incentives
2. Insentif Non Fiskal / Non Fiscal Incentives

2015

2016

2017-2018

2019-2024

Insentif / Incentives:

1. Insentif Prudensial / Prudential incentives
2. Information Hub
3. SF Award
4. Kebijakan Pelaporan / Policy on SF reporting

Kerja Strategis Ketahanan / Strengthening Resiliency:
Kerja Strategis Manajemen Risiko dan GCG terkait lingkungan dan sosial / strengthening of risk management and corporate governance in environmental and social aspects

2015-2019 :

Kampanye/Campaign, Training Analis LH/Environmental Analyst Trainings, Pengembangan/development of green product, Green Bond and Green Index, akses IJK terhadap/FSIs access to Global Public Funds, Koordinasi kebijakan SF/ Coordination on SF policy

RENCANA KERJA STRATEGIS KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Sasaran Strategis/ <i>Strategic Goals</i>		2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Peningkatan <i>supply</i> pendanaan ramah lingkungan untuk membentuk daya saing IJK di bidang keuangan berkelanjutan/ Increase supply of sustainable financing to strengthen competitiveness of Indonesian financial service industry	Melalui pemberian insentif untuk peningkatan portofolio IJK pada <i>green products</i>, mendorong inovasi, peningkatan kompetensi, penyediaan informasi dan akses ke <i>global public funds</i>/ through provision of incentives to FSIs to increase green products portfolio, encourage innovation, increase competency, information sharing and increase access to global public fund	Insentif Prudensial/ Prudential Incentives					
		Penetapan Porsi Keuangan Berkelanjutan / Requirement on portfolio for Sustainable Finance					
		Sustainable Finance Award					
		Insentif fiskal & non fiskal/ Fiscal and non-fiscal incentives					
		Pengembangan <i>green finance product</i> , <i>green bond</i> , <i>green index</i> / development of green finance products, green bonds and green index					
		Training Analisis Lingkungan Hidup, Seminar Nasional SF/ Training and National Seminars on Sustainable Finance					
		Green Lending Model sektor ekonomi prioritas/ Green lending models for priority sectors					
		Research and Development					
Penciptaan <i>demand</i> produk keuangan ramah lingkungan/ increase demand of environmentally friendly financing products	Melalui edukasi masyarakat mengenai Investasi Hijau/<i>life style</i>/ Trough public awareness raising and education on green investment and green financing	Information Hub					
		Meningkatkan akses IJK pada <i>global public funds</i> / Increase access of FSIs to global public funds					
Peningkatan Pengawasan dan Koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan/ Increase oversight and coordination of sustainable finance implementation	Melalui penguatan penerapan Manajemen, GCG pada aspek LH & sosial, peranan Kantor OJK dan percepatan Pembuatan Aturan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup/ Through the strengthening of risk management, corporate governance in environmental and social aspects, as well as the acceleration of the implementation of the Environmental Law.	Program kampanye kepada masyarakat calon investor/ Campaign program to potential investors on green financial products					
		Kebijakan Prinsip Keuangan Berkelanjutan / Regulation on Principles and Definition of Sustainable Finance in Indonesia					
		Sustainability Report					
		Forum Koordinasi Keuangan Berkelanjutan tingkat Nasional dan Daerah/ Forum on Sustainable Finance at National and Regional Levels					
		Kebijakan Manajemen Risiko LH & Sosial/ Regulation on Risk Management in Environmental and Social Aspects					

ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 – 2025)

Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025)

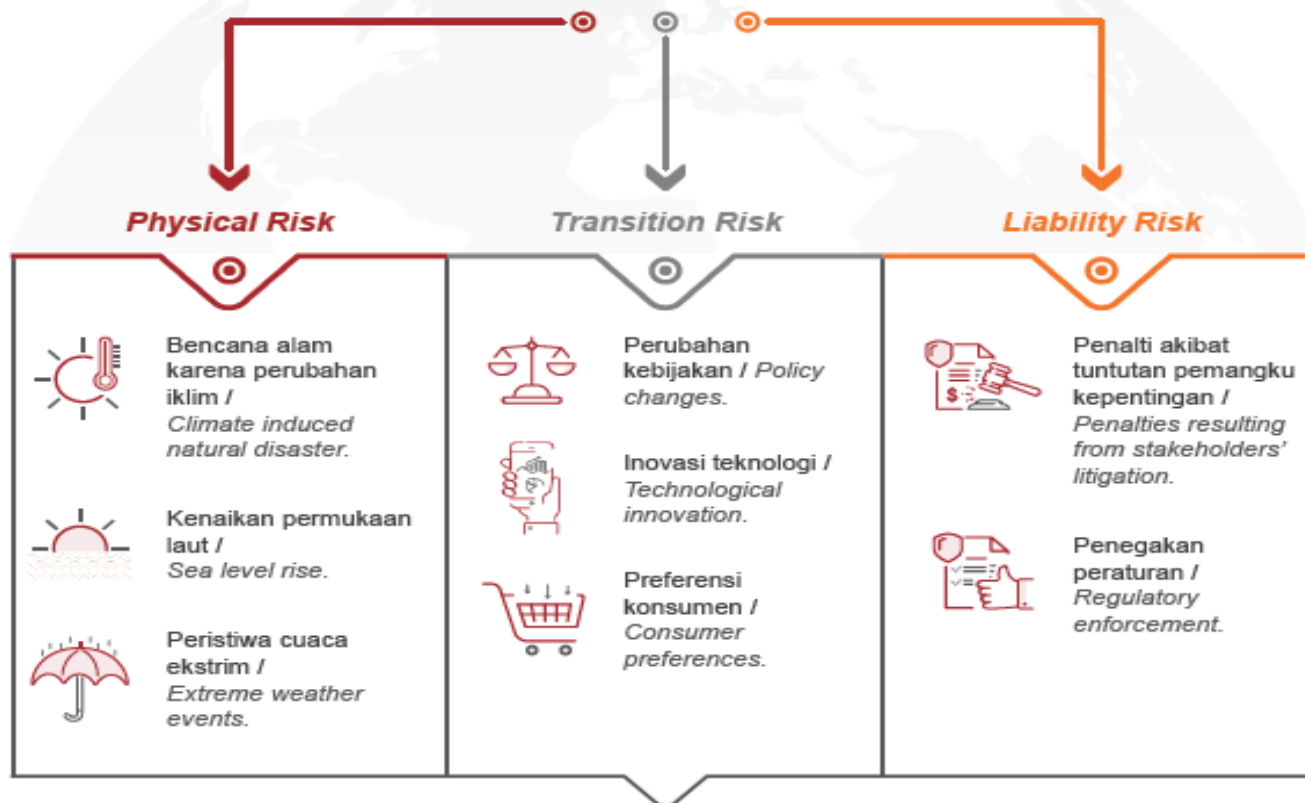
THE FUTURE OF FINANCE



Gambar 5. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia
Figure 5. Ecosystem of Sustainable Finance in Indonesia

RISIKO TERKAIT PERUBAHAN IKLIM¹⁵

Climate-Related Risks¹⁵



Potensi Dampak Finansial / *Potential Financial Impacts*



Gambar 8. Risiko Terkait Perubahan Iklim
Figure 8. Climate-related Risks



Gambar 1. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia /
Figure 1. Principles of Sustainable Finance in Indonesia.

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /POJK.03/2017
TENTANG
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

13. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

(6) Laporan Keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan:

- a. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
- b. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

LAMPIRAN II

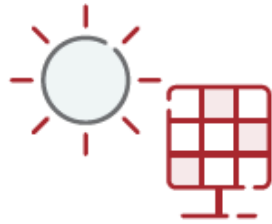
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /POJK.03/2017
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN
PUBLIK

I. UMUM

1. Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
2. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. penjelasan strategi keberlanjutan;
 - b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup);
 - c. profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik;
 - d. penjelasan Direksi;
 - e. tata kelola keberlanjutan;
 - f. kinerja keberlanjutan;
 - g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
 - h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
 - i. tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Energi Terbarukan /
Renewable Energy



Efisiensi Energi /
Energy Efficiency



Pencegahan dan
Pengendalian Polusi /
*Pollution Prevention and
Control*



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lahan yang Berkelanjutan /
*Sustainable Natural Resources and
Land Use*



Konservasi Keanekaragaman
Hayati Darat dan Air /
*Terrestrial and Aquatic
Biodiversity Conservation*



Transportasi Ramah
Lingkungan /
*Sustainable
Transportation*



Pengelolaan Air dan Air
Limbah yang Berkelanjutan /
*Sustainable Water and
Wastewater Management*



Adaptasi Perubahan Iklim /
Climate Change Adaptation



Produk Ramah Lingkungan /
Eco-efficient Products



Bangunan Berwawasan
Lingkungan /
Green Building



Kegiatan Usaha yang Berwawasan
Lingkungan Lainnya /
*Other Environmentally Friendly
Business Activities*



Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) /
*Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs)*

Gambar 2. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan
Figure 2. Sustainable Business Activities Category

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sustainable Development Goals (SDG's)



Kemitraan untuk Pelaksanaan SDGs di Indonesia

(Bappenas, 2019)

- Bappenas telah meluncurkan dokumen Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
- Dokumen tersebut menggolongkan para pemangku kepentingan SDGs menjadi Pemerintah, Akademisi, CSO, Masyarakat, Swasta, dan Organisasi Internasional.
- Aset dan potensi sektor swasta disebutkan di antaranya adalah 'penguatan kapasitas', 'dukungan dana dan mengelola dana CSR', dan 'berkaitan dan bekerja sama dengan berbagai pihak'.

Para Pihak	Ragam Aset dan Potensi	Minat, Peran dan Kontribusi
 Pemerintah	• Penetapan prioritas dan alokasi anggaran • Pengembangan program • Penyediaan kebijakan dan aturan yang mendukung KMP • Penyediaan data-data pembangunan (capaian dan defisit) • Lebih mengetahui konteks dan melokalkan • Mengelola dana dan personalia • Terbiasa melaksanakan program sendiri atau pengadaan barang dengan swasta	• Kemitraan pengetahuan • Kemitraan pelaksanaan
 Akademisi	• Penelitian-pemantauan • Penguatan kapasitas • Menjadi provider penelitian untuk pemerintah dan swasta • Pendampingan pemerintah • Pendidikan TPB • Fasilitator kemitraan	• Kemitraan pengetahuan • Kemitraan standardisasi • Kemitraan pelaksanaan
 CSO	• Diseminasi informasi—membangun pemahaman publik • Kemampuan teknis program <i>delivery</i> • Kemampuan pendampingan dan <i>capacity building</i> untuk kemitraan yang melibatkan masyarakat • Pemantauan program • Pemantauan proses kemitraan—akuntabilitas • Mengelola advokasi dan kampanye sosial • Pengalaman advokasi-perubahan kebijakan • Fasilitator kemitraan	• Kemitraan pengetahuan • Kemitraan standardisasi • Kemitraan Pelaksanaan
 Masyarakat/Komunitas	• Target sasaran kemitraan yang memahami konteks lokalitas dan kebutuhan di lapangan • Dukungan pelaksanaan kerja sama di lapangan	• Kemitraan pengetahuan • Kemitraan pelaksanaan
 Sektor Swasta	• Kemampuan <i>delivery</i> • Kemampuan jaringan dan pemahaman <i>value chains</i> untuk kemitraan pelaksanaan • Advokasi dan diseminasi • Penguatan kapasitas • Dukungan dana dan mengelola dana CSR • Berkaitan dan bekerja sama dengan berbagai pihak	• Kemitraan standardisasi • Kemitraan pelaksanaan • Kemitraan pendanaan
 Organisasi Internasional/ Development Partners	• Dukungan dana • Penguatan kapasitas melalui pendampingan, pemahaman isu, dan jaringan • Penguatan organisasi kemitraan • Fasilitator kemitraan	• Kemitraan pengetahuan • Kemitraan standardisasi • Kemitraan pelaksanaan • Kemitraan pendanaan

WHAT IS INTERNAL CONTROL

- Internal Controls (IC) are a set of policies (guidelines, manuals) and procedures (processes) which Management has the responsibility of implementing and maintaining (COSO 1992)

“internal control is a process , effected by an entity’s board of directors, management, and other personal, designed to provide reasonable insurance regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting, and compliance.”(COSO 2013)

- The objective of IC is to provide reasonable assurance that business’ goals are achieved
- IC aim to detect and prevent misstatements which may arise from fraud and error



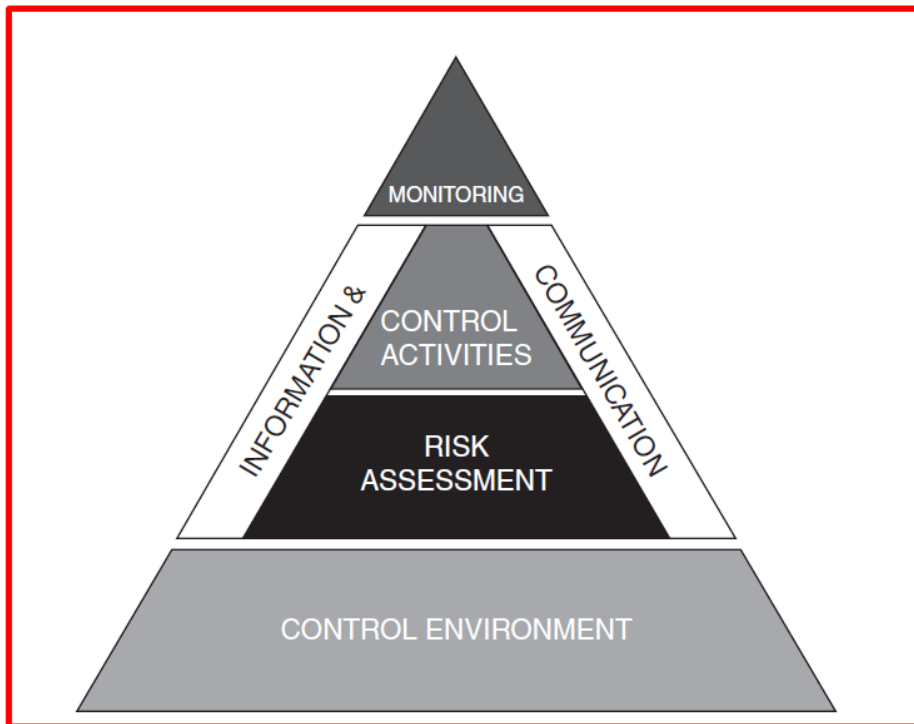
Internal Control

Methods and Measures Adopted To:

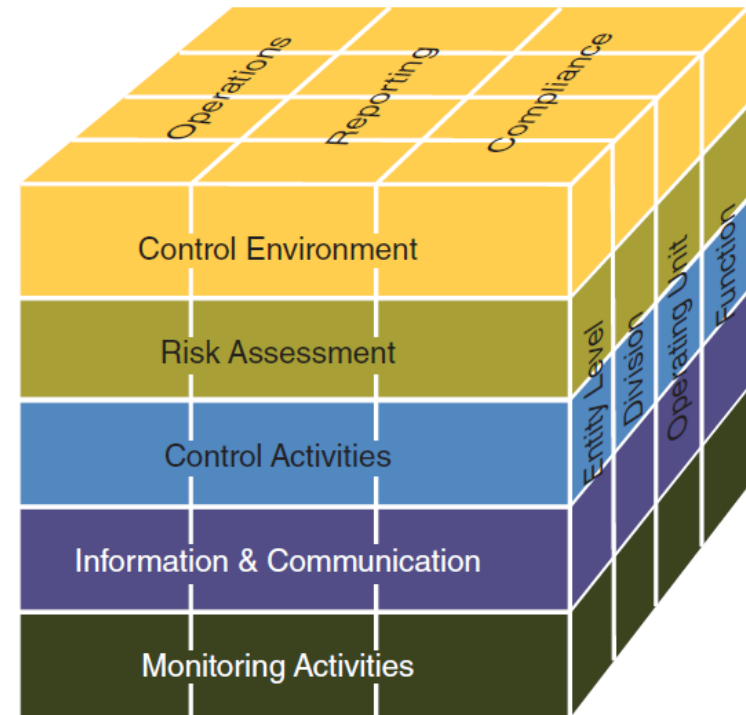
1. Safeguard assets.
2. Enhance the reliability of accounting records.
3. Increase efficiency of operations.
4. Ensure compliance with laws and regulations.

COSO FRAMEWORK 1992 & 2006

*Integrated Framework
report I*



*Integrated Framework II
(COSO CUBE)*



COSO 17 Principle

Component	Summary Principle
Control Environment	1. Demonstrates commitment to integrity and ethical values 2. Exercises oversight responsibility 3. Establishes structure, authority, and responsibility 4. Demonstrates commitment to competence 5. Enforces accountability
Risk Assessment	6. Specifies clear objectives 7. Identifies and analyzes risk 8. Assesses fraud risk 9. Identifies and analyzes significant changes
Control Activities	10. Selects and develops control activities to mitigate risks 11. Selects and develops information technology general controls 12. Deploys controls through policies and procedures
Information and Communication	13. Uses relevant information 14. Communicates internally 15. Communicates externally
Monitoring	16. Conducts ongoing and/or separate evaluations 17. Evaluates and communicates deficiencies



Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance

Executive Summary

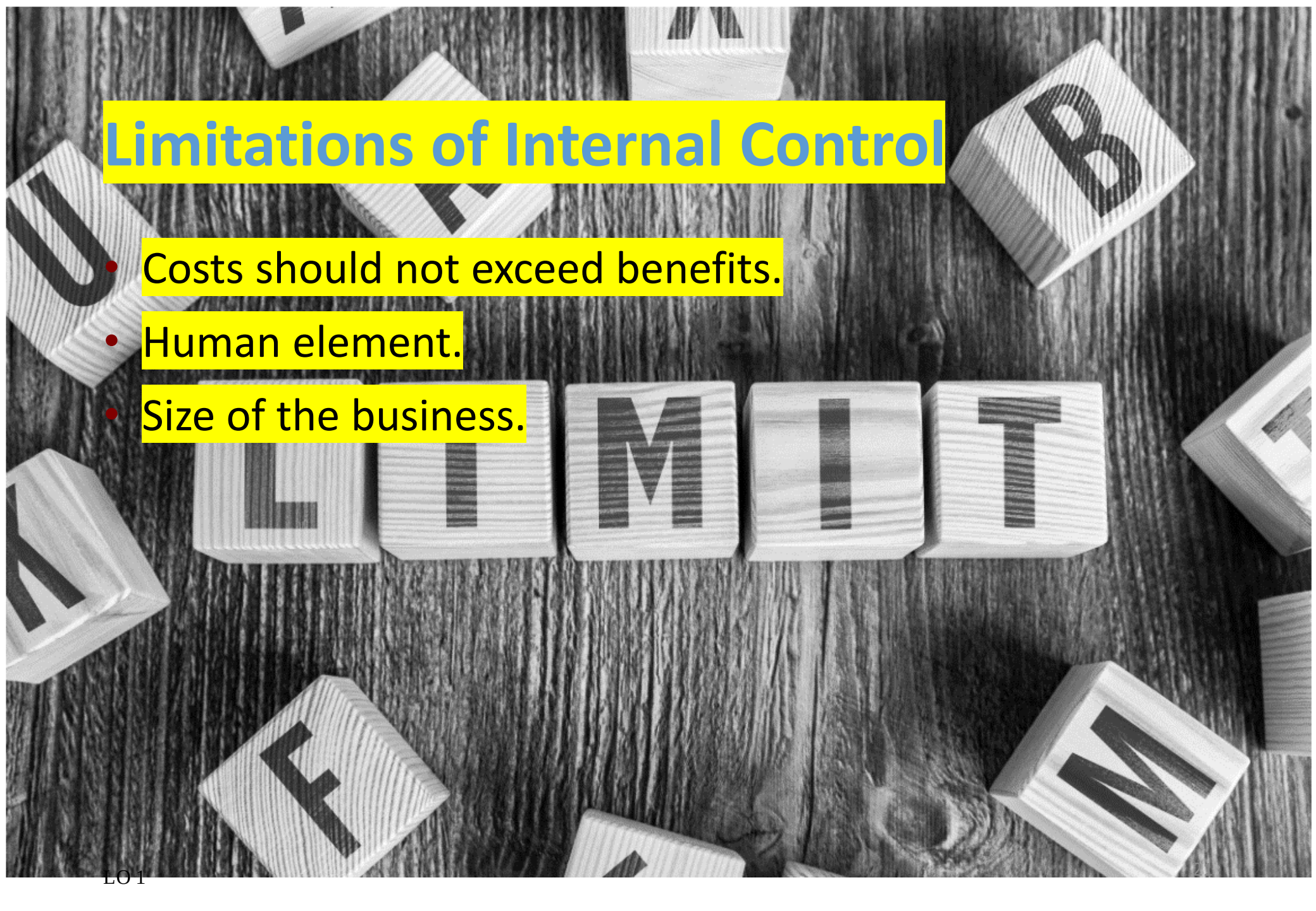


June 2017

NEW FRAMEWORK IN 2017

The Framework itself is a set of principles organized into five interrelated components:

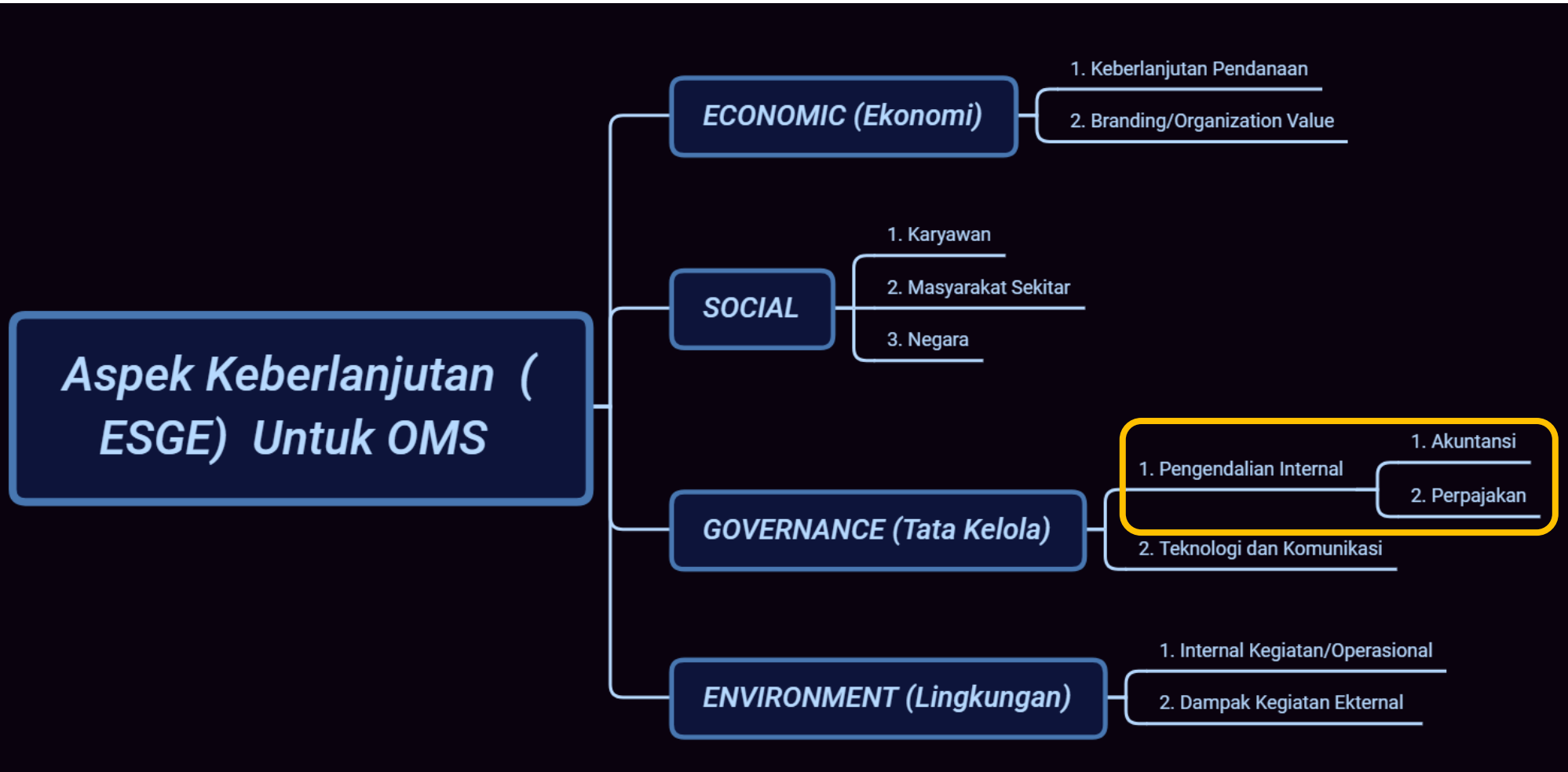
- 1. Governance and Culture:** Governance sets the organization's tone, reinforcing the importance of, and establishing oversight responsibilities for, enterprise risk management. Culture pertains to ethical values, desired behaviors, and understanding of risk in the entity.
- 2. Strategy and Objective-Setting:** Enterprise risk management, strategy, and objective-setting work together in the strategic-planning process. A risk appetite is established and aligned with strategy; business objectives put strategy into practice while serving as a basis for identifying, assessing, and responding to risk.
- 3. Performance:** Risks that may impact the achievement of strategy and business objectives need to be identified and assessed. Risks are prioritized by severity in the context of risk appetite. The organization then selects risk responses and takes a portfolio view of the amount of risk it has assumed. The results of this process are reported to key risk stakeholders.
- 4. Review and Revision:** By reviewing entity performance, an organization can consider how well the enterprise risk management components are functioning over time and in light of substantial changes, and what revisions are needed.
- 5. Information, Communication, and Reporting:** Enterprise risk management requires a continual process of obtaining and sharing necessary information, from both internal and external sources, which flows up, down, and across the organization.

The background of the slide is a black and white photograph of several wooden blocks scattered on a wooden surface. In the center, five blocks are arranged horizontally to spell out the word 'LIMIT'. Other blocks with letters like 'U', 'B', 'F', 'M', 'N', 'L', and 'A' are scattered around. A yellow rectangular box is overlaid on the top left, containing the title 'Limitations of Internal Control' in blue text.

Limitations of Internal Control

- Costs should not exceed benefits.
- Human element.
- Size of the business.

MIND MAP ESGE UNTUK OMS





2. LAPORAN KEBERLANJUTAN

Dana publik yang ada tidak cukup !

3. BLENDED FINANCE



**FINANCING FOR
DEVELOPMENT**

13-16 JULY 2015 • ADDIS ABABA • ETHIOPIA

Addis Ababa Action Agenda
of the Third International Conference on
Financing for Development
[Addis Ababa Action Agenda]



We recognize that both public and private investment have key roles to play in infrastructure financing, including through development banks, development finance institutions and tools and mechanisms such as public-private partnerships, blended finance, which combines concessional public finance with non-concessional private finance and expertise from the public and private sector, special-purpose vehicles, non-recourse project financing, risk mitigation instruments and pooled funding structures. Blended finance instruments including public-private partnerships serve to lower investment-specific risks and incentivize additional private sector finance across key

“Jumlah investasi dan aliran dana yang diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi (mitigasi) dan peningkatan kemampuan adaptasi jauh lebih besar dibandingkan dana yang tersedia dari dana publik dari dalam negeri maupun dari mekanisme pendanaan multilateral dan bilateral”

(Laporan UNFCCC 26 November 2008)

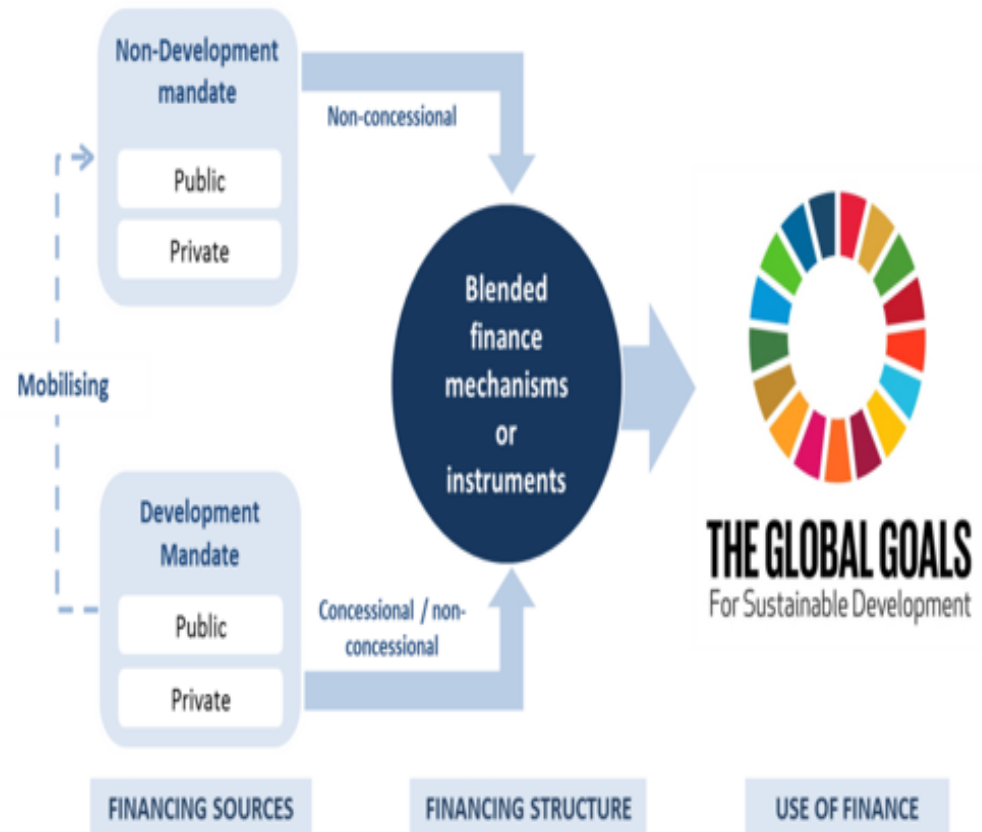
BLENDED FINANCE; DEFINISI INTERNASIONAL

■ The strategic use of **development finance** for the mobilization of additional finance towards sustainable development in developing countries' (OECD 2018b: 22).

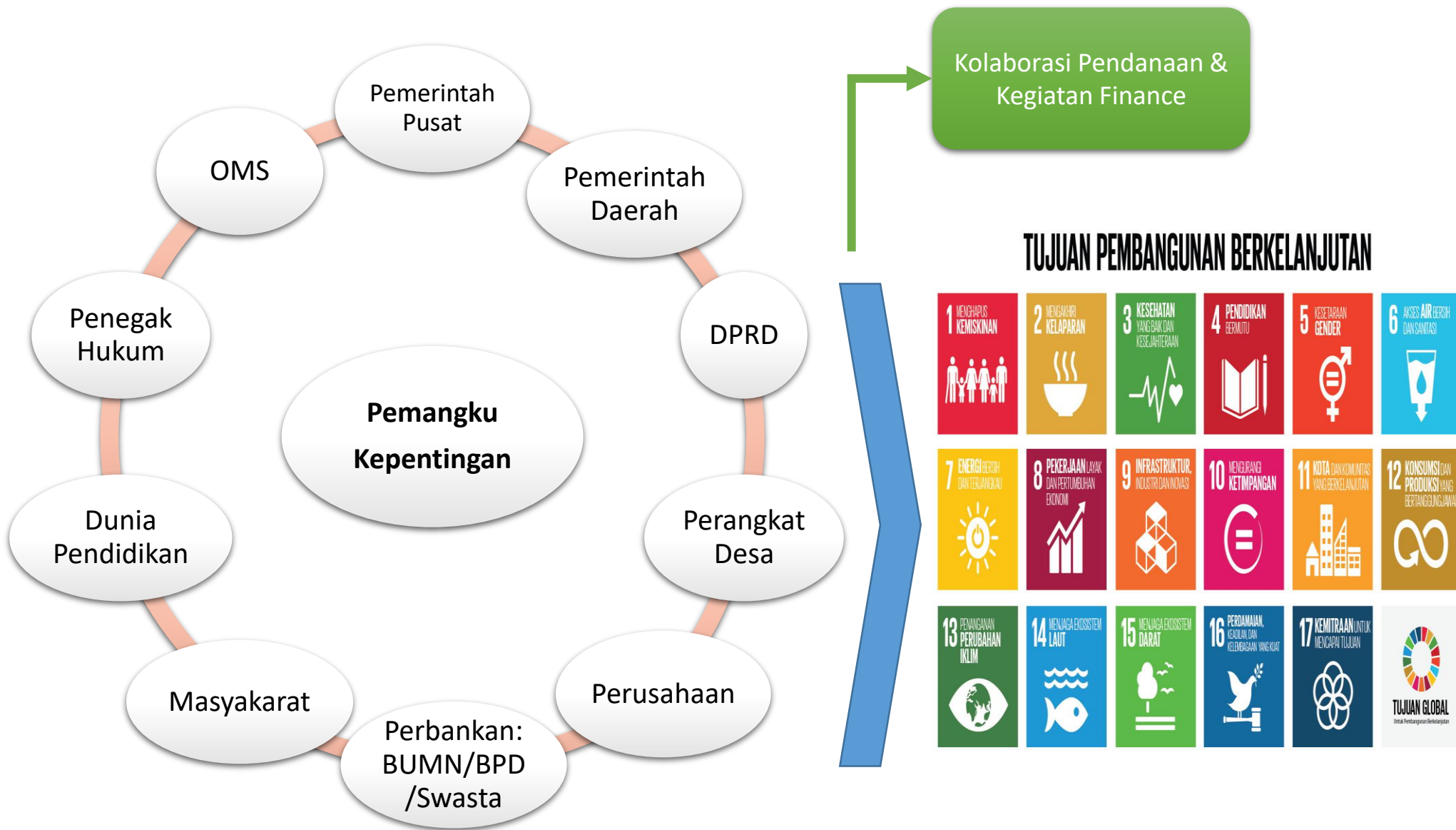
■ Combining **concessional finance** from **donors** or third parties alongside DFIs' normal own account finance and/or commercial finance from other investors, to develop private sector markets, address the SDGs, and mobilize private resources' (DFI Working Group 2017: 3).

■ The use of catalytic capital from public or philanthropic sources to increase private sector investment in developing countries and sustainable development (Convergence 2017).

■ The strategic use of concessional finance to **catalyse additional private-sector** or commercial investment in **SDG-related investments in developing countries**. (AAAA 2015)



Kolaborasi Penggunaan Dana Publik, Private (Swasta), Philanthropy (Filantropi), People (Personal) bersama dengan kegiatan/program untuk tujuan mensukseskan SDG's Sumber OECD (Derry,2021)



SUSTAINABLE OMS → PENERAPAN BLENDED FINANCE





DISKUSI:
LEMBAGA SAYA HUBUNGAN ANTARA SDG's & SF

SIKLUS UMUM MANAJEMEN KEUANGAN

SIKLUS UMUM KEGIATAN DAN KEUANGAN

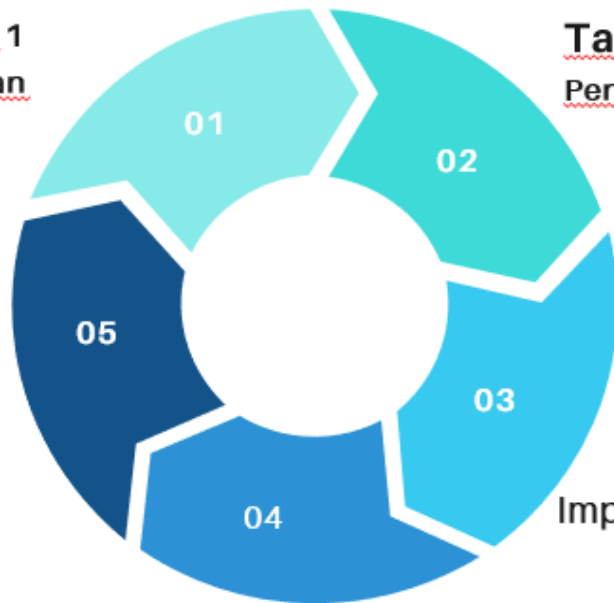
Tahap 1
Perencanaan

Tahap 2
Penganggaran

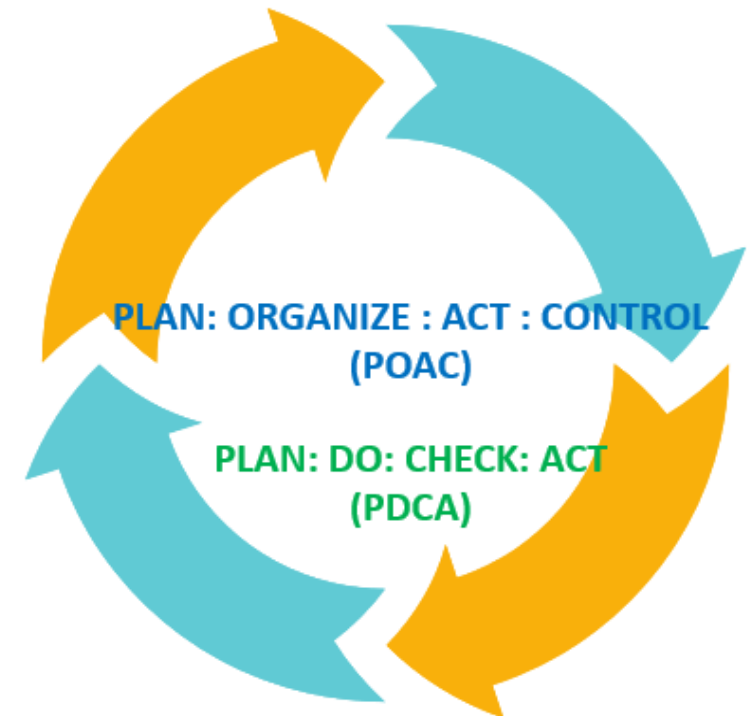
Tahap 3
Implementasi

Tahap 4
Pelaporan

Tahap 5
Reviu/Check/Audit

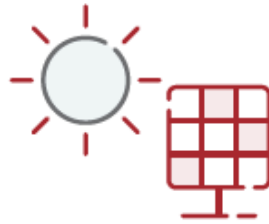


SIKLUS PRINSIP MANAJEMEN UMUM





Energi Terbarukan /
Renewable Energy



Efisiensi Energi /
Energy Efficiency



Pencegahan dan
Pengendalian Polusi /
*Pollution Prevention and
Control*



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lahan yang Berkelanjutan /
*Sustainable Natural Resources and
Land Use*



Konservasi Keanekaragaman
Hayati Darat dan Air /
*Terrestrial and Aquatic
Biodiversity Conservation*



Transportasi Ramah
Lingkungan /
*Sustainable
Transportation*



Pengelolaan Air dan Air
Limbah yang Berkelanjutan /
*Sustainable Water and
Wastewater Management*



Adaptasi Perubahan Iklim /
Climate Change Adaptation



Produk Ramah Lingkungan /
Eco-efficient Products



Bangunan Berwawasan
Lingkungan /
Green Building



Kegiatan Usaha yang Berwawasan
Lingkungan Lainnya /
*Other Environmentally Friendly
Business Activities*



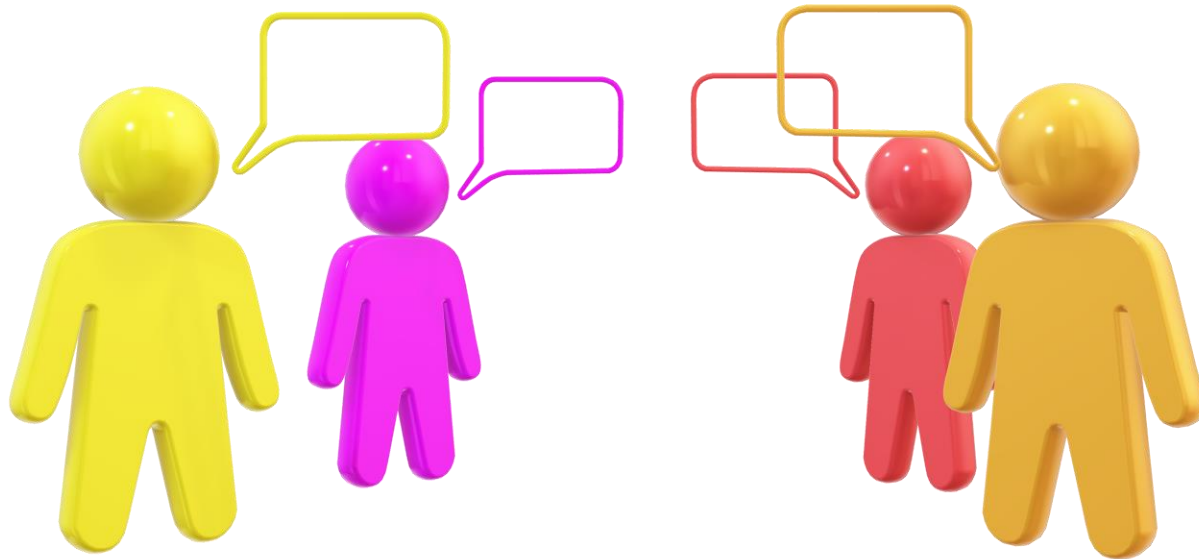
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) /
*Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs)*

Gambar 2. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan
Figure 2. Sustainable Business Activities Category

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sustainable Development Goals (SDG's)







Terima Kasih atas waktunya

“We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children.”

Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi

Adalah pilihan hidup menjadi akuntan putih, hitam, abu abu, biru, hijau atau merah. Pada akhirnya akuntan akan melaporkan *balance sheet* hidupnya kepada Zat tanpa awal dan zat tanpa akhir. (deywa)

Contact

Derry Wanta (0822 98 98 300)
derwa1899@gmail.com

THANK
YOU